

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 September 2019/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL KHALIQ**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **678225**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.005.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 230 m2/135 m2 di HULU SUNGAI UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000		
2. Bangunan Seluas 18 m2 di HULU SUNGAI UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
3. Tanah Seluas 1 m2 di HULU SUNGAI UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
4. Tanah Seluas 1.200 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
5. Tanah Seluas 720 m2 di PULANG PISAU, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	251.500.000
1. MOTOR, HONDA VARIO 125 CC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA 28D (MIO/AL115S)AT, SCOOTER Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
3. MOBIL, HONDA CR-V Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 232.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	16.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.750.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---



Sub Total	Rp.	1.274.750.000
III. HUTANG	Rp.	20.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.254.750.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **18 November 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.